



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)
TAHUN 2023**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2023**

Kata Pengantar

Alhamdulillah segala Puji dan Kebesaran hanya milik ALLAH SWT, yang atas izin-Nya sehingga Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Penyusunan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon pada dasarnya mengetengahkan gambaran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara utuh sepanjang Tahun 2023 yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Semoga Laporan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kinerja dalam mencapai visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon yaitu “ **Mewujudkan Ketangguhan Masyarakat Kabupaten Cirebon Dalam Menghadapi Bencana**“

Untuk itulah semua kritik, saran dan masukan yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan dari berbagai pihak, guna penyempurnaan dimasa mendatang.

Ditetapkan di : Sumber
Pada Tanggal : Februari 2024

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Cirebon

Dr. DENI NURCAHYA, ST., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19711021 200501 1 003

Daftar Isi

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL | v |
| DAFTAR DATA DAN GAMBAR | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Struktur Organisasi | 1 |
| 1.2 Fungsi dan Tugas | 3 |
| 1.3 Isu-Isu Strategis | 3 |
| 1.4 Keadaan Pegawai | 4 |
| 1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana | 6 |
| 1.6 Keuangan | 8 |
| 1.7 Sistematika LKjIP | 9 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 10 |
| 2.1 Perencanaan Strategis | 10 |
| 2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah | 11 |
| 2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah | 12 |
| 2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan | 13 |
| 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 | 13 |
| 2.3 Rencana Anggaran Tahun 2022 | 15 |
| 2.3.1 Target Belanja BPBD | 15 |
| 2.3.2 Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis | 15 |
| BAB AKUNTABILITAS KINERJA | 16 |
| III | |
| 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022 | 16 |
| 3.2 Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis | 18 |
| 3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya | 27 |
| 3.4 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan | |
| 3.5 Realisasi Anggaran | 33 |
| 3.6 Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan | 36 |
| 3.7 Inovasi | 66 |
| 3.8 Kerjasama Lintas Sektoral | 66 |
| BAB PENUTUP | 69 |
| IV | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

Daftar Tabel

-  Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja
-  Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2022 (Sasaran Strategis dan Program)
-  Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan
-  Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022
-  Tabel 3.5. Capaian Indikator Sasaran BPBD Tahun 2017-2022
-  Tabel 3.6. Meta Data Indikator Kinerja
-  Tabel 3.7. Capaian Standar Pelayanan Minimal/Indikator Kinerja Kunci Outcome Sub Urusan Bencana Tahun 2022
-  Tabel 3.8. Perbandingan Evaluasi Kinerja dengan OPD BPBD Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta Tahun 2022
-  Tabel 3.9. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2022
-  Tabel 3.10. Analisis efisiensi
-  Tabel 3.11. Formula Indikator Program BPBD
-  Tabel 3.12. Meta Data Indikator Kinerja Program Tahun 2017 – 2022
-  Tabel 3.13. Data KTB Tahun 2013 – 2022
-  Tabel 3.14. Korban Terdampak Bencana Tahun 2022
-  Tabel 3.15. Daftar Warga Terdampak Bencana yang Menerima Bantuan Material Non Permanen
-  Tabel 3.16. Realisasi Fisik dan Keuangan Output Sub Kegiatan Tahun 2022

Daftar Gambar

-  Gambar 3.1. Pentahelix Penanggulangan Bencana
-  Gambar 3.2. Hubungan Aspek Penanggulangan Bencana dan Indikator Kinerja BPBD
-  Gambar 3.3. Target dan Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2022
-  Gambar 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam RENSTRA
-  Gambar 3.5. Hubungan Output Sub Kegiatan Dan Indikator SPM
-  Gambar 3.6. Hubungan Output Sub Kegiatan Dan Indikator Kinerja Sasaran dan Program
-  Gambar 3.7. Tabulasi Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran dan Program BPBD Tahun 2022
-  Gambar 3.8. Frekuensi Kejadian Bencana Alam Tahun 2022
-  Gambar 3.9. Frekuensi Pemulian Jenazah Prokes Covid-19 Tahun 2022

BAB 1

Pendahuluan

Bab 1 Berisi :

1. *Struktur Organisasi*
2. *Fungsi dan Tugas*
3. *Isu Strategis*
4. *Keadaan Pegawai*
5. *Keadaan Sarana dan Prasarana*
6. *Keuangan*
7. *Sistematika LKIP*

Pada awalnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon. Kemudian pada Tahun 2021 ada Perubahan SOTK pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon yang kemudian dilengkapi dengan Peraturan Bupati Cirebon No. 32 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Tahun 2023 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh BPBD.

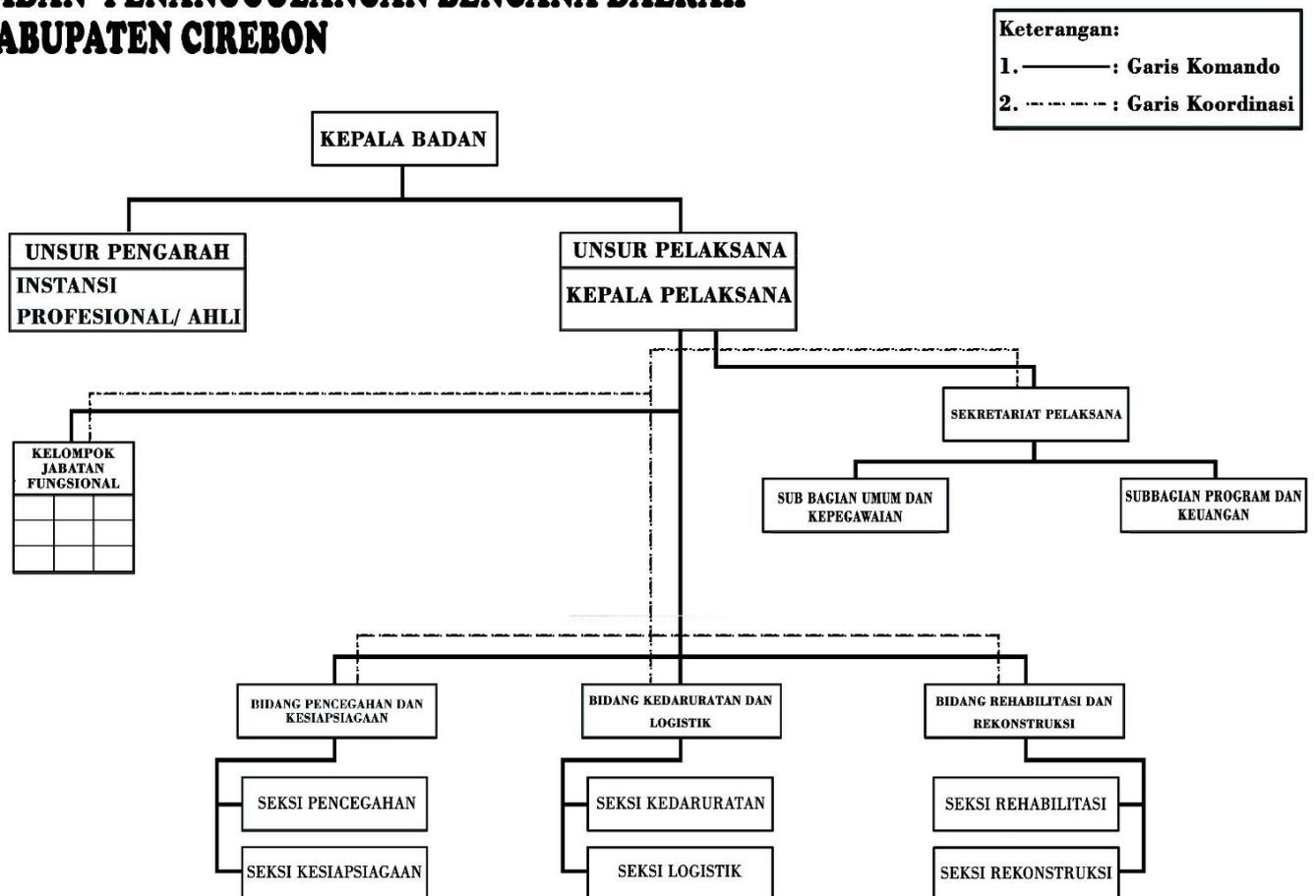
2. Mendorong BPBD didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPBD untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap BPBD di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon No. 32 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon, maka dapat dilihat bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon seperti gambar di bawah ini :

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN CIREBON



1.2 Fungsi dan Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon No. 32 Tahun 2022 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan pengoordinasian urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPBD mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang penanggulangan bencana daerah;
2. Pelayanan informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
5. Penataan sistem dasar penanggulangan bencana ;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pealporan bidang penanggulangan bencana daerah;
7. Pelaksanaan adminnistrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Isu-isu Strategis

Merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan dan memiliki dampak dalam jangka waktu tertentu bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis tersebut adalah :

1. Sinergisitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara pemerintah, swasta dan masyarakat belum maksimal;
2. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana terutama pada daerah rawan bencana belum sepenuhnya terlaksana;
3. Belum memadainya sarana dan prasarana penanganan bencana baik secara kuantitas maupun kualitas;

1.4 Keadaan Pegawai

1.4.1. Kondisi Riil Pegawai Berdasarkan , Golongan, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Jumlah personil yang ada per Desember 2023 sebanyak 62 (enam puluh dua) orang yang terdiri dari 18 orang ASN dan 42 orang TKK. Untuk rincian personil ASN dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1. ASN BPBD Berdasarkan Jabatan dan Golongan

| No | Golongan | Jenis Kelamin | | Pendidikan | | | | |
|-----|----------|---------------|---|------------|----|----|-----|-----|
| | | L | P | S3 | S2 | S1 | SMA | SMP |
| 1. | VI/c | | | | | | | |
| 2. | VI/b | 2 | | 1 | 1 | | | |
| 3. | VI/a | | 2 | | 2 | | | |
| 4. | III/d | 3 | 2 | | | 5 | | |
| 5. | III/c | 3 | | | | 3 | | |
| 6. | III/b | 1 | | | | 1 | | |
| 7. | III/a | 1 | | | | | 1 | |
| 8. | II/d | 2 | | | | | 2 | |
| 9. | II/c | | | | | | | |
| 10. | II/b | 1 | | | | | 1 | |
| 11. | II/a | 1 | | | | | 1 | |
| | Jumlah | 14 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | |

Tabel 1.2. Rekapitulasi Pemenuhan Anjab Tahun 2023

| Komposisi Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|---------|--------|
| No | Unit kerja | PNS | Honorer | Jumlah |
| 1. | Kepala Pelaksana | 1 | - | 1 |
| 2. | Sekretaris | 6 | 13 | 19 |
| 3. | Bidang Kedaruratan dan Logistik | 4 | 29 | 33 |
| 4. | Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi | 4 | 1 | 5 |
| 5. | Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan | 3 | 1 | 4 |
| JUMLAH | | 18 | 44 | 62 |

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Melihat tupoksi BPBD yang begitu banyak tidak berbanding dengan kualitas dan kuantitas SDM yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Cirebon. Sehingga dikarenakan kekurangan SDM yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Cirebon, maka BPBD Kabupaten Cirebon belum mampu mengerjakan seluruh tupoksi dengan maksimal. Kredibilitas pegawai merupakan penunjang terbesar dalam keberhasilan melakukan pelayanan kepada masyarakat dan faktor penunjang terlaksananya program kegiatan dengan maksimal.

Maka dibutuhkan penambahan pegawai BPBD Kabupaten Cirebon yang mempunyai kredibilitas dalam management penanggulangan bencana, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Sebagai acuan dalam pemenuhan jumlah kebutuhan pegawai untuk mengisi jabatan-jabatan yang dibutuhkan di BPBD Kabupaten Cirebon dapat di lihat pada tabel 3 di bawah ini:

Tabel 1.4. Kelengkapan Sarana dan Prasarana BPBD

| NO | NAMA BARANG | KONDISI (B/BR/RB) | JUMLAH BARANG | NILAI BARANG (RP.) |
|----|--|-------------------|---------------|--------------------|
| 1 | Software | Baik | 1 | 87.912.000 |
| 2 | Acces Point | Baik | 1 | 4.234.000 |
| 3 | Gergaji Chain Saw | Baik | 2 | 25.168.000 |
| 4 | Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus) | Baik | 3 | 65.208.000 |
| 5 | Perahu Motor Tempel | Baik | 2 | 29.744.000 |
| 6 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | Baik | 6 | 21.950.000 |
| 7 | Router | Baik | 1 | 1.359.000 |
| 8 | Server | Baik | 2 | 368.000.000 |
| 9 | Tandu | Baik | 4 | 13.746.000 |
| 10 | Tenda Pleton | Baik | 8 | 124.475.000 |
| 11 | Transportable Water Pump | Baik | 4 | 16.484.000 |
| 12 | Kabel UTP | Baik | 2 | 456.000 |
| 13 | Life Jacket | Baik | 75 | 21.000.000 |
| | JUMLAH | | 111 | 779.736.000 |

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPBD pada Tahun 2023 berasal dari APBD Kabupaten Cirebon. Pada tahun anggaran 2023 BPBD mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 7.500.184.100,- dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp 3.835.813.600,- belanja barang dan jasa sebesar Rp 2.965.586.500,- dan belanja modal sebesar Rp 698.784.000,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran startegis maupun program-program pendukung.

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPBD Kota Yogyakarta tahun 2023 adalah sebagai berikut: Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapaitujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala- kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKIP/manfaat LKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi BPBD, Potensi yang menjadi ruang lingkup BPBD dan Sistematika penulisan LKIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah- langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB 2

Perencanaan Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. *Perencanaan Strategis*
2. *Perjanjian Kinerja Tahun 2023*
3. *Rencana Anggaran Tahun 2023*

1.1 Perencanaan Strategis

Memasuki Tahun 2019, BPBD menyusun Rencana Strategis (Renstra) BPBD Tahun 2019-2024. Renstra BPBD merupakan manifestasi komitmen BPBD dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra BPBD Tahun 2019-2024 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di BPBD yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkelanjutan.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024 sebagai berikut,

Tabel 2.1. Ringkasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024

| Visi | Misi | Sasaran Daerah |
|--|---|---|
| Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Agamis, Maju dan Aman | Memelihara keamanan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional | Pencapaian efektifitas penyelenggaraan penanggulangan bencana |
| 0 | | |

(Sumber: RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024)

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BPBD mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah untuk “Infrastruktur Wilayah Meningkatkan”. Hal ini dilatar belakangi dengan kondisi penanggulangan bencana di Kabupaten Cirebon dimana belum tersedia sebuah sistem yang terintegrasi dan terpadu antara pemerintah, masyarakat dan swasta, baik dalam penyediaan sarana dan prasarana, manajemen, maupun kegiatan operasional dalam penanganan kebencanaan secara umum, sehingga perancangan sistem terpadu antara pemerintah, swast dan masyarakat dan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana untuk meminimalisir risiko bencana sangat diperlukan.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan konsep terintegrasi yaitu mengurangi risiko bencana – menanggulangi bencana secara cepat – membangun kembali masyarakat dan lingkungan yang terdampak bencana. Untuk itu, RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 menyebutkan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang terkait dengan penanggulangan bencana adalah:

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|----------------------------------|--|--|
| Meningkatkan Indeks Ketahanan/ Kapasitas Daerah | Menurunnya indeks risiko bencana | Penguatan kerangka hukum penanggulangan bencana Pengurusutamaan penanggulangan bencana dalam pembangunan Peningkatan kemitraan multipihak dalam penanggulangan bencana Pemenuhan tata kelola yang baik bidang penanggulangan bencana Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana Peningkatan kapasitas dan efektivitas pemulihan bencana | Meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana |
| | | | Penguatan tata kelola penanggulangan bencana |
| | | | Meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana |
| | | | Penguatan tata kelola penanggulangan bencana |
| | | | Peningkatan ketangguhan dalam menghadapi bencana |
| | | | Peningkatan ketangguhan dalam menghadapi bencana |
| | | | Peningkatan ketangguhan dalam menghadapi bencana |

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tujuan

Dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 disebutkan Tujuan dan sasaran strategis BPBD Kabupaten Cirebon yang akan dicapai dalam 5 tahun anggaran, yaitu:

Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis BPBD Tahun 2019-2024

| NO | TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET TAHUNAN | | | | |
|----|---|----------------------------------|-----------------------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Meningkatkan Indeks Ketahanan/ Kapasitas Daerah | Menurunnya Indeks Risiko Bencana | Indeks Risiko Bencana | Point | 170,80 | 165,80 | 160,80 | 155,80 | 150,80 |

2.1.3. Strategi, Program dan Kegiatan

Tujuan dan sasaran Strategis BPBD Kabupaten Cirebon tersebut, kemudian dijabarkan dalam strategi dan program kegiatan yang digunakan, sebagaimana termuat dalam table berikut ini:

Tabel 2.3. Strategi, Program dan Kegiatan

| NO | SASARAN STRATEGIS | PROGRAM | KEGIATAN |
|----|----------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Menurunnya Indeks Risiko Bencana | Program Penanggulangan Bencana | 1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota 2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana |

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET TAHUNAN |
|-----|----------------------------------|-----------------------|--------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Menurunnya Indeks Risiko Bencana | Indeks Risiko Bencana | Point | 150,80 |

Selain memuat Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis, Perjanjian Kinerja BPBD Tahun 2023 juga memuat Perjanjian Kinerja Sasaran Program, sebagai berikut:

| NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET TAHUNAN |
|-----|------------------------|---|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Penanggulangan Bencana | Proesentase Peningkatan Pencapaian SPM Penanggulangan Bencana | Persentase (%) | 90,59 |

Pada tahun 2023, BPBD melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan karena mengikuti perubahan Rencana Kerja dan review Renstra 2023. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET TAHUNAN |
|-----|---|-----------------------|--------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRBI) | Indeks Risiko Bencana | Indeks | 150,80 |

| NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET TAHUNAN |
|-----|------------------------|---|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Penanggulangan Bencana | Proesentase Peningkatan Pencapaian SPM Penanggulangan Bencana | Persentase (%) | 90,59 |

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 BPBD melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 7.500.184.100,- dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp 3.835.813.600,- belanja barang dan jasa sebesar Rp 2.965.586.500,- dan belanja modal sebesar Rp 698.784.000,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran startegis maupun program-program pendukung.

2.3.1. Target Belanja BPBD

Jika dibuat dalam bentuk perbandingan alokasi masing-masing belanja, maka persentase dari masing-masing jenis belanja APBD Perubahan BPBD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6. Target Belanja BPBD APBD Perubahan Tahun 2023

| Uraian | Target | Proesentase |
|--------------------------------|---------------------|-------------|
| Belanja Pegawai | Rp. 3.835.813.600,- | 86,70% |
| Belanja Barang dan Jasa | Rp 2.965.586.500,- | 92,40% |
| Belanja Modal | Rp 698.784.000,- | 99,60% |
| Jumlah | Rp 7.500.184.100,- | 100% |

2.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2023 BPBD yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7. Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

| No. | Sasaran | Anggaran | Proesentase | Keterangan |
|-----|----------------------------------|--------------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Menurunnya Indeks Risiko Bencana | Rp 7.500.184.100,- | 100% | Program Penanggulangan Bencana Rp 2.594.838.600,- 1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota Rp. 91.109.400,- 2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Rp 1.681.764.800,- 3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Rp 700.000.000,- 4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Rp 121.964.400,- |

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2023*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
3. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya*
4. *Realisasi Anggaran*

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Catatan sejarah kejadian bencana Kabupaten Cirebon menunjukkan bahwa Kabupaten Cirebon merupakan daerah rawan bencana. Dalam rentang 2017 sampai tahun 2023, Kabupaten Cirebon telah mengalami 41 kali kejadian bencana (DIBI, 2022). Kejadian bencana tersebut meliputi bencana banjir, gempa bumi dan cuaca ekstrem belum termasuk Wabah Penyakit yang sampai sekarang masih menjadi pandemi. Kejadian bencana cuaca ekstrem merupakan kejadian bencana yang paling sering terjadi. Kejadian bencana-bencana yang pernah terjadi menimbulkan dampak negatif, baik itu korban jiwa, harta benda maupun lingkungan/lahan yang rusak serta dampak psikologis bagi masyarakat di Kabupaten Cirebon.

Hubungan pentahelix dalam penanggulangan bencana digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1. Pentahelix Penanggulangan Bencana



Empat aspek Penanggulangan Bencana (PB) dengan melibatkan elemen pentahelix ini kemudian dijabarkan dalam program dan kegiatan BPBD Kabupaten Cirebon dengan indikator kinerjanya:

Gambar 3.2. Hubungan Aspek Penanggulangan Bencana dan Indikator Kinerja BPBD



Indikator Sasaran dan Program yang merupakan implementasi dari aspek penanggulangan bencana ini kemudian dituangkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Perjanjian Kinerja BPBD tahun 2023. Pelaksanaan penilaian Perjanjian Kinerja (Perkin) kemudian dilaksanakan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | $91 \leq 100$ | Sangat Baik |
| 2. | $76 \leq 90$ | Tinggi |
| 3. | $66 \leq 75$ | Sedang |
| 4. | $51 \leq 65$ | Rendah |
| 5. | ≤ 50 | Sangat Rendah |

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BPBD dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BPBD beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2023 (Sasaran Strategis dan Program)

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|----------------------------------|-----------------------|--------|--------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Menurunnya Indeks Risiko Bencana | Indeks Risiko Bencana | Point | 150,80 | 144,56 | 100% (karena target menurunkan IRBI) |

Sumber: BPBD Kabupaten Cirebon

Pada tahun 2023, indikator sasaran strategis BPBD dengan target 150,80 point, dan realisasinya adalah 144,56 point, maka capaian nya adalah 100% , karena semakin turun nilai realisasi nya maka nilai capaian nya indeks risiko bencana nya dalam kategori sangat baik.

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis BPBD yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.2.1 Sasaran Strategis: Menurunnya Indeks Risiko Bencana

Tolok ukur capaian sasaran menurunnya indeks risiko bencana dalam penanggulangan bencana diukur dengan 1 (satu) indikator, yaitu indikator: indeks risiko bencana (IRBI) dalam Penanggulangan Bencana.

Kinerja sasaran menurunnya indeks risiko bencana dalam Penanggulangan Bencana Meningkat dengan indikator Indeks Risiko Bencana dalam Penanggulangan Bencana pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

| No | Indikator Sasaran | 2023 | | | Target Akhir Renstra (2024) | Capaian s/d 2024 terhadap target 2023 (%) |
|----|-----------------------|--------|-----------|----------|-----------------------------|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian% | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Indeks Risiko Bencana | 150,80 | 144,56 | 100% | 145,80 | 99,31% |

Sumber: BPBD Kabupaten Cirebon

Pada tahun 2023, capaian target indikator sasaran strategis BPBD telah mencapai 92,90 atau tingkat capaian 100%. Capaian ini digambarkan dalam grafik berikut:

Gambar 3.3. Target dan Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2023



Dan jika dibandingkan dengan capaian kinerja dari tahun 2022 – 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.5. Capaian Indikator Sasaran BPBD Tahun 2022-2023

| Indikator Sasaran PD | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|
| | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| Indeks Risiko Bencana dalam Penanggulangan Bencana | 155,80 | 156,58 | 150,80 | 144,56 |

Sumber: BPBD Kabupaten Cirebon

3.3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA LAINNYA

3.3.1 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Indikator kinerja BPBD Kabupaten Cirebon yang termasuk dalam standar nasional adalah indikator kinerja pada program kegiatan yang realisasi dan capaiannya dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.7. Capaian Standar Pelayanan Minimal/Indikator Kinerja Kunci Outcome Sub Urusan Bencana Tahun 2023

| JENIS PELAYANAN DASAR | INDIKATOR CAPAIAN | TAHUN 2021 | | | | Keterangan |
|---|---|-----------------|---|-----------------------------|--------------------------|--|
| | | Target Nasional | Realisasi BPBD Kabupaten Cirebon | | | |
| | | | Jumlah orang yang berhak mendapat layanan | Jumlah orang yang terlayani | Capaian = (5):(4) X 100% | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Pelayanan informasi rawan bencana | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 100% | 2464 | 2464 | 100% | Kegiatan pemberian informasi rawan bencana dapat meliputi: a. Sosialisasi tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana; b. Sosialisasi melalui media sosial dan wahana multimedia; dan c. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik |
| Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100% | 2464 | 2464 | 100% | Data diambil dari Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah jumlah warga yang mendapatkan pelatihan pencegahan dan gladi kesiapan terhadap bencana di kawasan rawan bencana sebagai bentuk layanan langsung yang diterima oleh warga negara sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota. |
| Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100% | 134687 | 134687 | 100% | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah jumlah warga negara yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari kejadian bencana sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota. |

3.4 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Dari deskripsi capaian indikator kinerja dan pelaksanaan kegiatan diatas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kinerja BPBD Kabupaten Cirebon tahun 2023 berpredikat sangat baik dengan capaian indikator kinerja berupa Indeks Risiko Bencana dalam Penanggulangan Bencana 144,56 atau tercapai 100% dari target. Diketahui juga faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

A. Faktor Pendorong

1) Capaian indikator kinerja progam 100%;

Dari pembahasan diatas, telah diuraikan hubungan antara Penghitungan Indeks Risiko Bencana dalam Penanggulangan Bencana dan capaian indikator kinerja program. Untuk mencapai realisasi target Indeks Risiko Bencana dalam Penanggulangan Bencana 100% maka capaian terget indikator kinerja program juga harus 100%.

2) Kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi berkala;

Pada tahun 2023, kegiatan monitoring dan evaluasi regular dilaksanakan minimal 1 (satu) bulan sekali, sedangkan untuk pembahasan-pembahasan khusus, rapat koordinasi dan pengendalian dilaksanakan sewaktu-waktu diperlukan. Selain peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi, perbaikan tatalaksana juga terus dilakukan peningkatan.

3) Transparansi data dan informasi;

Pengelolaan data dan informasi BPBD pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan, dimana masing-masing bidang telah memiliki sumber data yang terkoneksi melalui website, atau kita bisa mendapatkan data dan informasi dari TIM unit data dan informasi penanggulangan bencana.

4) Pelibatan lintas sektoral dalam pelaksanaan kegiatan;

Pelibatan lintas sektoral menjadi salah satu perhatian utama pada tahun 2023 dan pengembangan pada tahun-tahun seterusnya. Pada tahun-tahun sebelumnya, kerjasama lintas sektoral yang dilaksanakan oleh BPBD masih bersifat non formal dan belum ada legalitas serta mekanisme yang memadai.

B. Faktor Penghambat

Selain faktor pendorong, beberapa hal dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan pemenuhan indikator kinerja masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah:

1. Jumlah alat pemantau permukaan sungai secara kuantitas masih kurang;
2. Masih kurangnya Sumberdaya Manusia yang memiliki kemampuan tentang penanggulangan bencana;
3. Belum dilakukan kurasi aman bencana bagi bangunan sekolah secara masif;
4. Jumlah pemasangan petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul belum mencakup keseluruhan fasilitas-fasilitas umum dan belum menyebar di beberapa daerah rawan bencana;
5. Dokumen Kajian Risiko Bencana belum dilegalkan oleh kepala daerah;

3.5 REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2023 sebesar 90,16% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 94,29% dan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 93,56%. Sedangkan pencapaian fisik kegiatan adalah 100%. Melihat hal ini, dapat disimpulkan bahwa kinerja BPBD Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 sudah baik.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2023 (Rp) | Realisasi Tahun 2023 (Rp) | Sisa Tahun 2023 (Rp) | Penyerapan % |
|--------------|---|----------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------|
| | | | | | |
| | Belanja Daerah | Rp 7.500.184.100 | Rp 6.761.969.591 | Rp 738.214.509 | 90,16 |
| | Belanja Operasi | Rp 6.801.400.100 | Rp 6.065.959.591 | Rp 735.440.509 | 89,19 |
| | Belanja Modal | Rp 698.784.000 | Rp 696.010.000 | Rp 2.774.000 | 99,60 |
| 01:01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp 4.905.345.500 | Rp 4.339.233.691 | Rp 566.111.809 | 88,46 |
| A. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp 35.038.800 | Rp 30.342.800 | Rp 4.696.000 | 86,60 |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Rp 22.222.000 | Rp 20.826.000 | Rp 1.396.000 | 93,72 |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Rp 5.664.600 | Rp 5.664.600 | Rp - | 100,00 |
| 3 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp 7.152.200 | Rp 3.852.200 | Rp 3.300.000 | 53,86 |

| | | | | | |
|-----------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| B. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp 3.849.109.300 | Rp 3.589.026.465 | Rp 260.082.835 | 93,24 |
| 3 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp 3.835.813.600 | Rp 3.325.810.580 | Rp 510.003.020 | 86,70 |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Rp 7.157.000 | Rp 7.127.000 | Rp 30.000 | 99,58 |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Rp 6.138.700 | Rp 6.138.700 | Rp - | 100,00 |
| C. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp 700.041.100 | Rp 667.246.157 | Rp 32.794.943 | 95,32 |
| 6 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Rp 15.155.600 | Rp 15.064.000 | Rp 91.600 | 99,40 |
| 7 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp 430.237.300 | Rp 430.038.300 | Rp 199.000 | 99,95 |
| 8 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Rp 6.816.100 | Rp 6.816.100 | Rp - | 100,00 |
| 9 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Rp 8.283.400 | Rp 6.783.400 | Rp 1.500.000 | 81,89 |
| 10 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Rp 21.584.600 | Rp 12.594.200 | Rp 8.990.400 | 58,35 |

| | | | | | |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 11 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Rp 27.000.000 | Rp 23.900.000 | Rp 3.100.000 | 88,52 |
| 12 | Penyediaan Bahan/ Material | Rp 79.999.900 | Rp 73.551.800 | Rp 6.448.100 | 91,94 |
| 13 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Rp 10.999.200 | Rp 6.245.000 | Rp 4.754.200 | 56,78 |
| 14 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp 99.965.000 | Rp 92.253.357 | Rp 7.711.643 | 92,29 |
| D. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp 12.000.000 | Rp 4.063.154 | Rp 7.936.846 | 33,86 |
| 15 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rp 12.000.000 | Rp 4.063.154 | Rp 7.936.846 | 33,86 |
| E. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp 309.156.300 | Rp 298.505.300 | Rp 10.651.000 | 96,55 |
| 16 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Rp 79.915.000 | Rp 76.705.700 | Rp 3.209.300 | 95,98 |
| 17 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Rp 148.755.500 | Rp 141.313.800 | Rp 7.441.700 | 95,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 18 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp 30.540.000 | Rp 30.540.000 | Rp - | 100,00 |
| 19 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Rp 49.945.800 | Rp 49.945.800 | Rp - | 100,00 |
| 01:02 | Program Penanggulangan Bencana | Rp 2.594.838.600 | Rp 2.422.735.900 | Rp 172.102.700 | 93,37 |
| F. | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Rp 91.109.400 | Rp 91.109.400 | Rp - | 100,00 |
| 20 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana) | Rp 91.109.400 | Rp 91.109.400 | Rp - | 100,00 |
| G. | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Rp 1.681.764.800 | Rp 1.535.024.000 | Rp 146.740.800 | 91,27 |
| 21 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota | Rp 250.000.000 | Rp 224.220.000 | Rp 25.780.000 | 89,69 |
| 22 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Rp 1.431.764.800 | Rp 1.310.804.000 | Rp 120.960.800 | 91,55 |
| H. | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Rp 700.000.000 | Rp 685.326.500 | Rp 14.673.500 | 97,90 |

| | | | | | |
|---------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 23 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Rp 700.000.000 | Rp 685.326.500 | Rp 14.673.500 | 97,90 |
| I. | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Rp 121.964.400 | Rp 111.276.000 | Rp 10.688.400 | 91,24 |
| 24 | Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Rp 61.421.000 | Rp 61.421.000 | | 100,00 |
| 25 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Rp 60.543.400 | Rp 49.855.000 | Rp 10.688.400 | 82,35 |
| Jumlah | | Rp 7.500.184.100 | Rp 6.761.969.591 | Rp 738.214.509 | 90,16 |

Capaian Realisasi Anggaran Belanja Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon selama periode tahun 2023 secara keseluruhan dan di bagi menjadi dua program dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1: Tabel serapan anggaran

| Program | Target | | Realisasi | | % |
|---|---------|---------------|-----------|---------------|-------|
| | Kinerja | Anggaran | Kinerja | Anggaran | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 4.906.345.500 | | 4.339.233.691 | 88,46 |
| Program Penanggulangan Bencana | 100% | 2.594.838.600 | | 2.422.735.900 | 93,37 |

Berdasarkan data pada tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2022 anggaran belanja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon melalui mekanisme Perhitungan Efektivitas Anggaran Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon di dapatkan hasil seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 2: Perhitungan Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja

| Program | Anggaran | Realisasi (Rp) | Persentase Realisasi | Kriteria |
|---|---------------|----------------|----------------------|----------|
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 4.906.345.500 | 4.339.233.691 | 88,46 | Efektif |

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|-------|---------|
| Program Penanggulangan Bencana | 2.594.838.600 | 2.422.735.900 | 93,37 | Efektif |
|--------------------------------------|---------------|---------------|-------|---------|

Dengan demikian realisasi anggaran belanja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon dapat dikatakan efektif.

Sedangkan untuk Perhitungan Efisiensi Anggaran Belanja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 3: Perhitungan Efisiensi Anggaran Belanja pada
BPBD Kabupaten Cirebon

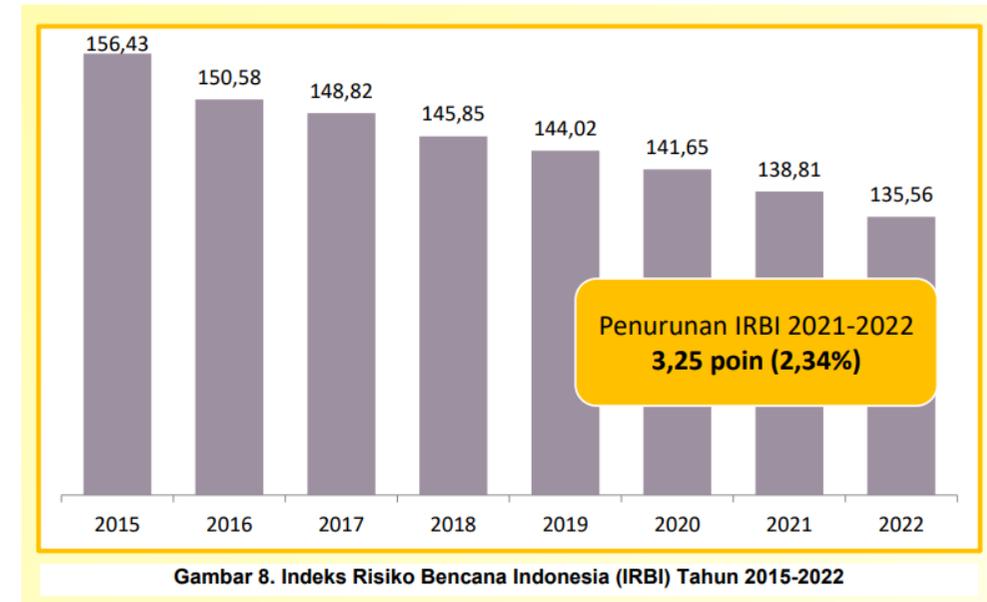
| Program | Anggaran | Realisasi (Rp) | Persentase Realisasi | Kriteria |
|---|-----------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 4.906.345.500 | 4.339.233.691 | 88,46 | Efisien |
| Program Penanggulangan Bencana | 2.594.838.600 | 2.422.735.900 | 93,37 | Efisien |

Berdasarkan data yang ada pada tabel diatas maka dapat disimpulkan secara keseluruhan tingkat efisiensi Anggaran Belanja Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon berada pada kriteria efisien.

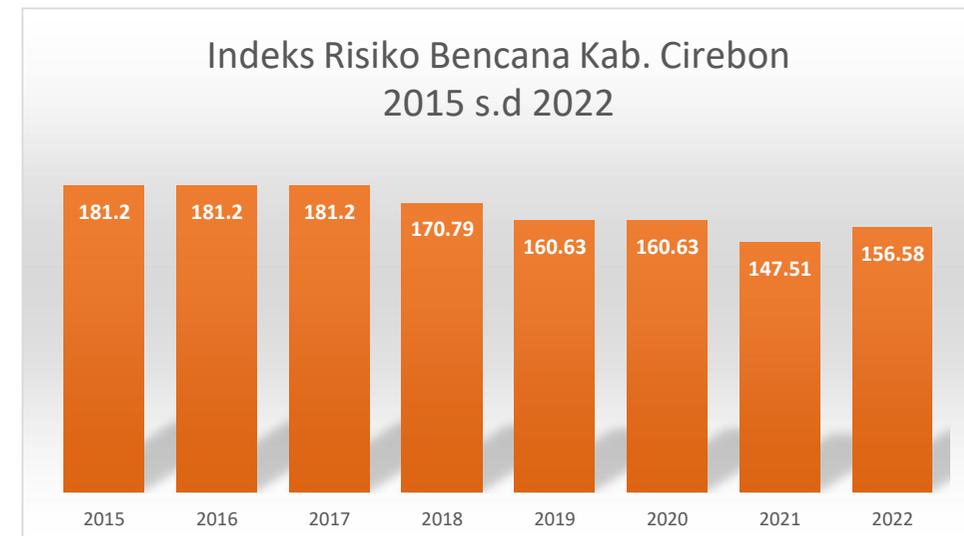
3 Benchmark Perbandingan Kinerja

PERBANDINGAN KINERJA

- BNPB
- BPBD Provinsi Jabar
- BPBD Kabupaten Cirebon



Grafik nilai indeks risiko Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2015 sampai dengan tahun 2022



BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. Kesimpulan
2. Saran

Kesimpulan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*. SAKIP merupakan sebuah system dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (Performance-base Management) untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintahan yang baik, maka perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun.

LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi selama tahun anggaran 2023. Laporan tersebut merupakan implementasi dari Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai keberhasilan sasaran di tahun 2023 yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan rencana, menunjukkan capaian rata-rata indikator kinerja sasaran **baik**.

Dari hasil pengukuran kinerja nampak bahwa secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah berhasil mencapai target kinerja sasaran dan kegiatan serta telah dapat memenuhi fungsi yang dibebankan pada organisasi dari 2 (Dua) sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Meskipun secara rata-rata capaian sasaran dan kegiatan sangat baik, namun belum seluruh target kinerja sasaran maupun kegiatan dapat dicapai seperti yang diharapkan. Hal ini tidak terlepas dari faktor-faktor lingkungan baik internal misalnya sosialisasi, mengukur, mencatat dan melaporkan kinerja yang terjamin integritas data dan ketepatan waktunya mesti terus ditingkatkan, maupun lingkungan eksternal misalnya kerjasama, sinergi dan kualitas komunikasi dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta lembaga atau pihak-pihak lainnya yang harus terus ditingkatkan, dengan demikian kinerja organisasi terutama capaian sasaran diharapkan dapat dicapai sesuai rencana yang ditetapkan.

Saran

Sangat disadari masih diperlukan perbaikan di berbagai bidang agar dapat mempertahankan bahkan untuk meningkatkan kinerja yang telah dicapai organisasi. Adapun hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk tahun-tahun yang akan datang guna mencapai kinerja yang lebih baik dari setiap jajaran di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka diperlukan:

1. Penyempurnaan implementasi anggaran berbasis kinerja agar seluruh kegiatan dapat dinilai kinerjanya secara tepat.
2. Indikator kinerja kegiatan dan indikator program perlu disempurnakan secara terus menerus melalui upaya identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi secara terus menerus sehingga dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian program/kegiatan di masing-masing unit kerja pelaksana kegiatan di lingkungan

Sekretariat Daerah.

3. Peningkatan pengkoordinasian di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon itu sendiri, baik peningkatan pengkoordinasian APBD maupun penyusunan perumusan kebijakan dan program kerja dalam pelaksanaan operasional pemerintah daerah.

Ditetapkan di : Sumber

Pada Tanggal : Februari 2024

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Cirebon

Dr. DENI NURCAHYA, ST., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19711021 200501 1 003